

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya (Karyono, 2013). Kecenderungan kecurangan akuntansi atau *fraud* di Indonesia maraknya terjadi akhir-akhir ini, tindak kecurangan itu berupa pengambilan atau pencurian harta atau aset milik organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Tindakan kecurangan dalam akuntansi dapat terjadi karena beberapa kondisi seperti yang dijelaskan oleh Cressey (1953), dalam Arens (2015), menyebutkan teori *fraud triangle*, bahwa korupsi disebabkan karena adanya tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*).

Tindakan kecurangan atau (*fraud*) tidak hanya terjadi disektor swasta (*private*), tetapi terjadi juga di lingkungan sektor Pemerintah. Pelaku kecurangan dapat dari dalam atau dari luar organisasi dan dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan. *Fraud* yang terjadi disektor Pemerintah, merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat, hal ini tentunya dapat berdampak pada kehilangan kepercayaan terutama terkait kemampuan kepemimpinan instansi Pemerintah (Adinda, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk tindak pidana korupsi adalah setiap orang

yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi (*corruption*) adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, meyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara.

Menurut Mustika *et .al.*, (2016), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah penyuapan, penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, pengelapan dan *mark-up* yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* selain korupsi dua jenis kecurangan lainnya adalah kecurangan terhadap aset (*asset misappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), tetapi yang sering terjadi di sektor Pemerintah adalah *fraud* jenis korupsi.

Menurut penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga Juni 2017 mencatat ada 226 kasus korupsi. Jumlah tersangka 587 orang merugikan negara sekitar Rp 1,83 triliun dan nilai suap sekitar Rp 118,1 miliar. 226 kasus korupsi pada tahun 2017 yang sangat rentan adalah lembaga Pemerintah daerah. Terdapat 121 kasus korupsi dilakukan di lembaga pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi (*detik.news*). Indonesia adalah negara dengan peringkat indeks persepsi berada diperingkat ke-96 dari 180 negara (*transparency international, 2018*).

Berkaitan dengan hal tersebut, di sektor Pemerintah juga terdapat beberapa kasus korupsi. Instansi Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tidak luput dari kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Bangka Belitung menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengaduan masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2018 berjumlah 166 aduan, Lima aduan tahun 2018 terdiri dari 2 Pangkalpinang, 1 Bangka, 1 Bangka Selatan, 1 Belitung Timur. Misalnya, pembangunan rumah pintar di Kabupaten Belitung, korupsi Dana SSPD, Bendahara DPRD Pangkalpinang, kasus korupsi dana kepemudaan pada dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) kabupaten belitung (*sumber: BKPSDMD*).

Kasus korupsi kegiatan proyek pembangunan Taman Mandara Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) kota Pangkalpinang, kasus korupsi pengadaan dan pemasangan *instrument lading system* (ILS) Bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 dengan penganggaran Rp 12 milyar milik Departemen Perhubungan RI mulai bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipkor) Kota Pangkalpinang dan kasus dugaan batuan sosial (Bansos) fiktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009, peyimpangan dana batuan sosial (Bansos) kematian tahun 2015 di instansi DPPKAD Kabupaten Bangka dan korupsi pembebasan lahan kantor Barsarnas di Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka nilai proyeknya sebesar Rp. 3,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 1,8 Miliar (*sumber: BKPSDMD*).

Tekanan (*pressure*) adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologi pelaku. Tekanan yang sering sekali datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan seringkali dianggap tidak bisa dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga akan diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya tenjadilah penyebab kecurangan. Kompensasi menurut Edison *et .al.*, (2017), adalah suatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada perkejaannya. Kompensasi ini merupakan bentuk imbalan (baik berbentuk uang maupun natura) yang diterima karyawan/pegawai atas usaha-usaha yang dihasilkan. Kesesuaian kompensasi dibutuhkan agar individu dapat merasa tercukupi dan dapat meminimalisir keinginan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Indriastuti *et .al.*, (2016), sistem kompensasi yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian terdahulu, terbukti banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah. *Opportunity* adalah peluang memungkinkan terjadinya *fraud*. Pengendalian internal yang lemah disuatu organisasi, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Tiga faktor resiko kecurangan (tekanan, kesempatan, dan pembenaran) peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisai dari tingkat paling atas. Sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Keefektifan pengendalian internal akan menutup peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Hasil dari penelitian Najahnigrum *et .al.*, (2013), keefektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi/instansi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Asimetri informasi yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara (masyarakat) *principal* sebagai pengguna informasi dan (pemerintah daerah) *agent* sebagai penyedia informasi (Fahmi, 2017). Jika terjadinya tidak seimbang informasi antara pihak pengguna dan pihak yang mengelola maka akan muncul peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Mustika *et .al.*, (2016), bahwa tingginya asimetri informasi yang terjadi dapat menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel yang digunakan untuk *opportunity* dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan akuntansi di Indonesia yaitu ketaatan aturan akuntansi, keharusan bagi suatu organisasi/instansi untuk taat terhadap standar akuntansi yang ada dalam pembuatan laporan keuangan sehingga menjamin bahwa tujuan dari pembuatan laporan keuangan dapat terwujud. Kecurangan akuntansi yang terjadi di sektor Pemerintah dalam pengelolaan anggaran juga terkait dengan ketidaktaatan terhadap aturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menimbulkan peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Mustika *et .al.*, (2016), megatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi juga disebabkan oleh hal yang substansial, yaitu sikap dan tanggung jawab moral perusahaan atau organisasi. Organisasi sektor pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang diwakili oleh manajemen organisasi tersebut, maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan suatu organisasi/instansi pemerintah tergantung pada moralitas manajemen, jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam organisasi/instansi akan mencerminkan moralitasnya.

Kegiatan dalam suatu organisasi atau instansi dapat berjalan dengan efektif dan efisien dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan organisasi tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai, apabila terjadi pelanggaran pelaku akan diberi hukuman atau sanksi agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. Hasil penelitian Najahningrum (2013), dan Mustika *et .al.*, (2016), Jika disuatu organisasi atau instansi penegak hukum dinilai baik maka perilaku penyimpangan seperti kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi dapat diminimalisirkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Mustika *et .al.*, (2016), penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan penambahan variabel independen. Penelitian ini memilih organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagai objek penelitian dan penambahan variabel moralitas manajemen dan penegak hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya objek penelitian sebelumnya pada Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung.

Banyaknya kasus kecurangan akuntansi disektor Pemerintah, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan penegak hukum yang selanjutnya akan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?
2. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?

4. Apakah ketaatan aturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?
5. Apakah moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?
6. Apakah penegak hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?
7. Apakah kesesuaian kompensasi, keefektifan Pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan penegak hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Batasan masalah dalam penelitian ini mengambil para pegawai struktural yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai responden dan penulis membatasi masalah hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ini ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.

2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.
4. Menganalisis dan membuktikan pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.
5. Menganalisis dan membuktikan pengaruh moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.
6. Menganalisis dan membuktikan pengaruh penegak hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.
7. Menganalisis dan membuktikan pengaruh ksesuaian kompensasi, keefektifan Pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan penegak hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor Pemerintah

1.5 Kontribusi Penelitian

Menurut Jogiyanto (2010), penelitian dapat memberikan manfaat kepada pemakai hasil penelitian, yaitu :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberi manfaat bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Sektor Pemerintah.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi di sektor Pemerintah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan memberi gambaran menyeluruh penelitian ini, maka dalam penulisannya akan dibahas dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan penelitian ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan uraian tujuan serta manfaat penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan pendapat para ahli yang dipakai sebagai landasan dalam penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan dalam rerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan objek penelitian, sampel dan teknik sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan analisis terhadap permasalahan yang ada melalui antara teori-teori yang ada dengan praktek yang diterapkan organisasi dan berdasarkan metode dan analisis yang dipilih.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan mengemukakan beberapa saran guna perbaikan yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan organisasi/instansi dimasa akan datang

